



**R  
E  
N  
S  
T  
R  
A**

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2026



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN MEMPAWAH**

Jl. Daeng Manambon Telp. (0561) – 691144 Email. [dinaspumpw@gmail.com](mailto:dinaspumpw@gmail.com)

**MEMPAWAH**



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya penyusunan Dokumen Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah Periode 2025 – 2026 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan Good Governance yang merupakan tuntutan terselenggaranya manajemen Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa, Berdaya Guna dan Berhasil Guna.

Perencanaan Strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan, sehingga merupakan terobosan dalam pembangunan, terutama untuk menggali sumber-sumber daya alam yang ada di Kabupaten Mempawah.

Akhir kata semoga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah ini dapat dilaksanakan dan memberi manfaat bagi peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Khususnya Urusan Pekerjaan Umum.

Mempawah, Februari 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Dan Penataan Ruang  
Kabupaten Mempawah

  
HAMDANI, ST  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670818 199403 1 008



# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1. Latar Belakang .....	1
2. Landasan Hukum .....	2
3. Maksud dan Tujuan .....	4
4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>8</b>
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD .....	8
2. Sumber Daya SKPD .....	9
3. Kinerja Pelayanan SKPD .....	11
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .....	17
<b>BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>19</b>
1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD .....	19
2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	27
3. Penentuan Isu-isu Strategis .....	30
<b>BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>35</b>
1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD .....	33
2. Strategi dan Arah Kebijakan .....	36
<b>BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	<b>52</b>
1. Strategi .....	52
2. Arah Kebijakan .....	52



<b>BAB VI</b>	<b>: RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>56</b>
<b>BAB VII</b>	<b>: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>67</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>71</b>



# BAB 1

# PENDAHULUAN

*Halaman 1 - 7*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Undang-undang 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mencakup landasan hukum di bidang Perencanaan Pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, menetapkan bahwa sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Undang-undang 25 Tahun 2004 ini juga diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menggariskan bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun Pembangunan Antar Daerah.

Dengan telah berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah Tahun 2020 – 2024, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah perlu menindaklanjuti dengan membuat Rencana Strategis (Renstra) pada Tahun 2025 – 2026.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah sebagai unsur staf yang secara tugas dan fungsi antara lain mengkoordinir/memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam masa lima tahun, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah sebagai SKPD yang dipimpin oleh pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah juga diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah Tahun 2025 – 2026 dilandasi oleh peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-



- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
  13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 63 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 63);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2005 – 2025;
18. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026;

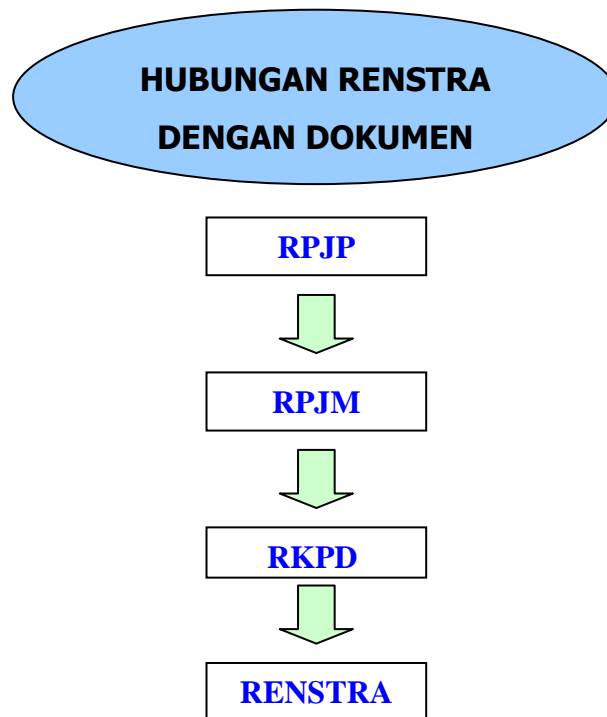
### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah Tahun 2025 - 2026 dengan maksud :

- Sebagai dokumen perencanaan bagi Kepala OPD untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD, rencana jangka pendek 1 tahun;
- Sebagai dokumen pembangunan yang berkelanjutan yang bisa dijadikan pegangan untuk memahami visi, misi, strategi dan arah kebijakan OPD dalam 2 tahun periode Pembangunan sebelum RPJMD terbaru ditetapkan.

Agar terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas yang baik dalam perencanaan pembangunan, maka Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kabupaten Mempawah sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan.

Adapun hubungan Rencana Strategis dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagaimana tergambar pada bagan berikut ini.



Tujuan Renstra OPD yaitu :

- Merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Mempawah;
- Sebagai arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah untuk jangka waktu dua tahun periode pembangunan;
- Pedoman penjabaran visi, misi dan arah pembangunan dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang bersifat teknis operasional dan berfungsi sebagai acuan operasional di dalam terwujudnya perencanaan pembangunan sebagaimana yang dikehendaki.

#### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam Penulisan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah Tahun 2025 - 2026 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri dari :



## KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.3 Penentuan Isu-isu Srategis

### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3 Strategi Kebijakan

### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII PENUTUP**



## BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN PD

*Halaman 8- 18*

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. Pembinaan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari
  - Sub Bagian Umum dan Aparatur;
  - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Bidang Bina Marga, membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari :
  - Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
  - Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan;
4. Bidang Cipta Karya, membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari :
  - Seksi Pembangunan Gedung;

- Seksi Pemeliharaan Gedung;
- 5. Bidang Sumber Daya Air, membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari:
  - Seksi Irigasi dan Air Baku;
  - Seksi Pengembangan Daerah Rawa dan Pantai;
- 6. Bidang Tata Ruang, membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari :
  - Seksi Pemanfaatan Ruang;
  - Seksi Pengendalian Ruang;
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Mempawah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Tahun 2020 didukung jumlah Aparatur/ Pegawai sebanyak 68 orang dan 10 orang Pegawai Tidak Tetap, jumlah Pegawai Negeri Sipil dapat dirinci sebagai berikut :

NO	ESELON / NON ESELON	GOLONGAN					PENDIDIKAN							
		I	II	III	IV	JLH	SD	SLTP	SLTA	D3	D4	SI	S2	JLH
1	ESELON II	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1
2	ESELON III	-	-	3	1	4	-	-	-	-	-	1	3	4
3	ESELON IV	-	-	6	1	7	-	-	-	-	1	4	2	7
4	NON ESELON	-	22	34	-	56	1	5	30	5	-	15	-	56
<b>JUMLAH</b>		<b>0</b>	<b>22</b>	<b>43</b>	<b>3</b>	<b>68</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>68</b>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah per 31 Desember 2023

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan profesionalisme aparatur akan terus dilakukan upaya-upaya peningkatan profesionalisme melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas, walaupun dana untuk peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang tersedia di dalam APBD jumlahnya sangat terbatas.

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat Dinas, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Penataan Ruang. Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, baik segi teknis operasional maupun administratif sesuai dengan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan dan rumah tangga dinas. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi; pengkoordinasian penyusunan rencana dan tugas-tugas Bidang; pengelolaan administrasi keuangan; pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana; pengelolaan urusan umum, kearsipan dan kehumasan serta keprotokolan; pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga dinas; pengkoordinasian penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan program kerja serta penganggaran dinas; pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja Dinas; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan organisasi, tatalaksana, perlengkapan, rumah tangga dinas dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan dan administrasi keuangan dinas.

Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang Bina Marga. Bidang Bina Marga, membawahi 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Bina Marga di bidang pembangunan jalan dan jembatan dan Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Bina Marga di bidang Pemeliharaan jalan dan jembatan.

Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang Cipta Karya, yang membawahi 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Pembangunan Gedung mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Cipta Karya di bidang Pembangunan Gedung serta Seksi Pemeliharaan Gedung mempunyai tugas



melaksanakan sebagian tugas Bidang Cipta Karya di bidang Pemeliharaan Gedung.

Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang Sumber Daya Air, yang membawahi 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Irigasi dan Air Baku mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Sumber Daya Air di bidang irigasi dan air baku serta Seksi Pengembangan Daerah Rawa dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Sumber Daya Air di bidang pengembangan daerah rawa dan pantai.

Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang Tata Ruang, yang membawahi 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Tata Ruang dibidang Pemanfaatan Ruang dan Seksi Pengendalian Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Tata Ruang di bidang Pengendalian Ruang.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan; Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan – undangan; Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang yang ditunjuk; Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; Jenis dan jenjang jabatan fungsional peraturan perundangan – undangan.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menempati gedung kantor yang sebelumnya merupakan gedung ex Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah, yang mulai ditempati sejak bulan Agustus 2008.

Sedang sarana pendukung kinerja pelayanan SKPD untuk kegiatan sehari-hari dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



**Tabel 1**  
**Peralatan Kantor**

No	Peralatan Kantor	Jumlah		Kondisi	
1	Meja ½ biro	80	Buah	79	Baik
				1	Rusak
2	Kursi	103	Buah	100	Baik
				3	Rusak
3	Meja Rapat	9	Buah	9	Baik
4	Meja 1 Biro	6	Buah	6	Baik
5	Kursi Rapat	50	Buah	50	Baik
6	Kursi Tunggu Stainlis	3	Set	3	Baik
7	Kursi Putar	13	Buah	10	Baik
				3	Rusak
8	GPS	1	Unit	1	Baik
9	Meja Gambar	3	Buah	3	Baik
10	Lemari	6	Buah	6	Baik
11	Mesin Ketik	1	Buah	1	Baik
12	Komputer	25	Unit	23	Baik
				2	Rusak
13	Telpon	1	Buah	1	Baik
14	AC	22	Unit	19	Baik
				3	Rusak
15	Brankkas	1	Unit	1	Baik
16	Filling Kabinet	9	Unit	4	Baik
				5	Rusak
17	Lemari Besi	2	Unit	2	Baik
18	Lap Top	6	Unit	4	Baik
				2	Rusak
19	Dep Slump Tes	1	Unit	1	Baik
20	Printer Ink Jet Canon	1	Unit	1	Baik
21	Printer LQ 2190	1	Unit	1	Baik
22	Printer Canon IP 100 Portable	4	Unit	4	Baik
23	Printer Ink Jet	4	Unit	4	Baik
24	Printer Desk Jet All In One	1	Unit	1	Baik
25	Mesin Chainsaw	4	Buah	3	Baik
				1	Rusak
26	Mesin Pompa Air	2	Buah	1	Baik
				1	Rusak
27	Proyektor	1	Unit	1	Baik
28	Layar Proyektor	1	Unit	1	Baik
29	Faximili	1	Unit	1	Baik
30	Peralatan Sound System	1	Unit	1	Baik
31	Tong Sampah TPS Fibre	291	Unit	122	Baik
				169	Rusak
32	Gorden	2	Set	1	Baik
				1	Rusak
33	Kamera	1	Set	1	Baik

No	Peralatan Kantor	Jumlah		Kondisi	
34	Vacum Cleaner	1	Unit	1	Baik
35	Tenda	2	Buah	2	Baik
36	Tempat Sampah Stainless	2	Buah	2	Baik
37	Televisi	1	Unit	1	Baik
38	Eskavator	1	Unit	1	Unit

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mempawah

**Tabel 2**  
**Mobilitas Kantor**

No	Mobilitas Kantor	Jumlah		Kondisi	
1	Kendaraan Roda 2	21	Unit	21	Baik
2	Kendaraan Roda 3	1	Unit	1	Baik
3	Kendaraan Roda 4	8	Unit	5 3	Baik Rusak Berat
	Jumlah	30	Unit		

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mempawah

**Tabel 3**  
**Aset Tanah dan Bangunan**

No.	Aset Tanah dan Bangunan	Luas
1.	Tanah Kantor	4,175 m <sup>2</sup>
2.	Bangunan Kantor	720 m <sup>2</sup>
3.	Bangunan Gudang Trasnsfer Depo	36 m <sup>2</sup>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mempawah

Dari tabel tersebut diatas dapatlah dijelaskan bahwa fasilitas sarana dan prasarana pendukung kinerja pelayanan cukup memadai untuk mendukung program dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah. Contoh seluruh ruangan sudah disediakan pendingin ruangan (AC), meja, kursi, komputer dan lain sebagainya. Contoh operasional dilapangan disediakan kendaraan dinas roda empat dan roda dua, GPS dan Drone. Sarana dan prasarana yang disediakan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah merupakan wujud keseriusan Pemerintah Daerah dalam menciptakan kenyamanan dan kelancaran dalam bekerja.



Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24 dengan format sebagai berikut:



Tabel T-C.23  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Mempawah Tahun 2025 - 2026

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap				54,18	59,40	61,90	60,95		57,75	60,30	59,10	60,95		106,59	101,52	95,48	100,00	
2	Persentase Bangunan Gedung yang dibangun dalam Kondisi Baik				80,00	53,00	56,00	70,00		80,00	53,00	56,00	70,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman Melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi dengan Kebutuhan Pokok Minimal 60 ltr Perorang Perhari				62,00	62,00	63,00	72,00		61,06	62,09	63,73	73,42		98,48	100,15	101,16	101,97	
4	Persentase Akses Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/ Perdesaan				0	68,90	80,00	85,00		0	79,09	80,07	86,74		0	114,79	100,09	102,05	
5	Persentase Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada Sesuai dengan Kewenangan				2,04	23,10	24,27	25,45		0,27	23,10	24,27	25,45		13,24	100,00	100,00	100,00	
6	Persentase Penyelenggaraan Penetapan, Perencanaan, Pemanfaatan serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang				10,00	20,00	30,00	40,00		10,00	20,00	30,00	33,33		100,00	100,00	100,00	83,33	



Tabel T-C.24  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Mempawah

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -				Rata-rata Pertumbuhan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN	-	-	5.000.000.000,00	5.400.000.000,00				5.072.788.298,00	3.846.111.535,00		-	-	101,46	71,22	-	2.600.000.000,00	4.459.449.916,50
PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	5.000.000.000,00	5.400.000.000,00				5.072.788.298,00	3.846.111.535,00		-	-	101,46	71,22	-	2.600.000.000,00	4.459.449.916,50
BELANJA	-	116.279.531.336,00	105.203.344.100,00	141.708.440.716,00		-	114.717.338.993,00	96.163.260.302,00	124.380.052.214,00		-	98,66	91,41	87,77	90.797.829.038,00	83.815.162.877,25	
BELANJA OPERASI	-	64.903.910.325,00	44.059.079.714,00	69.048.762.127,00		-	63.643.146.873,00	40.983.453.402,00	64.044.667.018,00		-	98,06	93,02	92,75	44.502.938.041,50	42.167.816.823,25	
BELANJA PEGAWAI	-	6.730.381.960,00	7.177.919.269,00	7.155.588.150,00		-	6.598.005.754,00	6.759.948.062,00	6.454.201.014,00		-	98,03	94,18	90,20	5.265.972.344,75	4.953.038.707,50	
BELANJA BARANG DAN JASA	-	58.173.528.365,00	36.881.160.445,00	61.893.173.977,00		-	57.045.141.119,00	34.223.505.340,00	57.590.466.004,00		-	98,06	92,79	93,05	39.236.965.696,75	37.214.778.115,75	
BELANJA MODAL	-	51.375.621.011,00	61.144.264.386,00	72.659.678.589,00		-	51.074.192.120,00	55.179.806.900,00	60.335.385.196,00		-	99,41	90,25	88,04	46.294.890.996,50	41.647.346.054,00	
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	-	206.527.633,00	87.800.500,00	-		-	204.639.733,00	83.734.000,00	-		-	99,09	95,37	-	73.582.033,25	72.093.433,25	
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	-	4.407.956.750,00	6.983.500.000,00	2.284.000.000,00		-	4.382.952.950,00	4.340.807.000,00	2.261.279.000,00		-	99,43	62,16	99,01	3.418.864.187,50	2.746.259.737,50	
BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	46.761.136.628,00	54.072.963.886,00	70.375.678.589,00			46.486.599.437,00	50.755.265.900,00	58.074.106.196,00			99,41	93,86	82,52	-	42.802.444.775,75	38.828.992.883,25	

---

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

### 1) Tantangan

Tantangan utama yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan dua urusan wajib (urusan Pekerjaan Umum dan urusan Penataan Ruang) adalah:

- a. Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi.
- b. Perubahan iklim yang tidak menentu, menyulitkan kegiatan dilapangan sehingga mempengaruhi pelaksanaan fisik dilapangan dan kualitas pekerjaan.
- c. Belum optimalnya pelaksanaan Sosialisasi Rencana Tata Ruang di Kabupaten Mempawah.
- d. Regulasi yang belum ditetapkan dengan peraturan daerah yang terkait dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
- e. Optimalisasi Sumber daya manusia dengan menempatkannya berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalamannya serta pengajuan personil baru yang dibutuhkan.
- f. Belum memadainya prasarana dan sarana air bersih, drainase dan air limbah (sanitasi) di Kabupaten Mempawah.
- g. Sebagian wilayah Kabupaten Mempawah yang berada di kawasan pesisir dan dataran rendah yang berpotensi mengalami banjir.

### 2) Peluang

Peluang untuk mengembangkan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan dua urusan wajib (urusan Pekerjaan Umum dan urusan Penataan Ruang) adalah:

- a. Lokasi wilayah Kabupaten Mempawah yang cukup strategis, serta didukung oleh keberadaan Proyek Strategis Nasional Pelabuhan Kijing di Kecamatan Sungai Kunyit memberikan peluang terhadap sumber pendanaan pembangunan dari APBN dan sumber-sumber lainnya.



- b. Dukungan sumber dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Tematik untuk pekerjaan fisik dalam rangka penanganan stunting, sanitasi, dan lain sebagainya dirasa cukup maksimal dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan serapan anggaran yang mencapai 100 %.
- c. Ketersediaan sistem perijinan berbasis online melalui OSS-RBA dan SIMBG memberikan kemudahan dalam rangka peningkatan iklim investasi di Kabupaten Mempawah.
- d. Konektivitas dan aksesibilitas di Kabupaten Mempawah yang sudah cukup baik.
- e. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan teknologi sangat perlu dilakukan agar masyarakat memperoleh informasi dapat dengan mudah dan cepat.



## **BAB III**

# **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

*Halaman 19 - 32*

## **BAB III**

# **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang**

Isu-isu strategis merupakan salah satu sumber masukan dalam melakukan analisis lingkungan eksternal dan internal terhadap proses perencanaan. Jika analisis lingkungan eksternal dan internal diidentifikasi dengan baik dan tepat, maka pemerintahan daerah dalam 2 (dua) tahun kedepan akan dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak menyesuaikan atau memperhatikan isu strategisnya kemungkinan akan menghadapi hambatan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya atau tidak berhasil dalam mencapai tujuan yang hendak di capai.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi bina marga, cipta karya, sumber daya air, tata ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sejalan dengan kondisi terkini, isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

#### **3.1.1 PEKERJAAN UMUM**

1. Sekretariat :
  - a. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal.
  - b. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan yang bersertifikat.

- c. Pengendalian dan evaluasi hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum optimal.
  - d. Belum optimal data dan informasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
  - e. Belum optimalnya peran dan penempatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan bidangnya.
2. Bidang Bina Marga :
- a. Belum tersedianya updating SK Jalan Kabupaten dan data base perencanaan program yang lengkap dan valid dalam rangka menunjang kegiatan penyusunan program kerja di Bidang Bina Marga (pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan dan jembatan) maupun perencanaan teknis secara lebih baik dan terarah.
  - b. Terbatasnya kemampuan dan keterampilan SDM di bidang Bina Marga yang disebabkan minimnya kegiatan pendidikan maupun pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM terutama dalam hal penyusunan rencana program dan rencana teknis.
  - c. Minimnya sarana dan prasarana penunjang aktifitas kerja, terutama yang berkaitan sarana survey, penelitian, mobilitas dan sebagainya.
3. Bidang Cipta Karya :
- a. Banyak bangunan yang ada di wilayah Kabupaten Mempawah dari bangunan rumah dinas/instansi, kantor, bangunan masyarakat yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung.
  - b. Terbatasnya kemampuan dan keterampilan SDM di bidang Cipta Karya yang disebabkan minimnya kegiatan pendidikan maupun pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM terutama dalam hal penyusunan rencana program dan rencana teknis.
  - c. Belum tersedianya data base gedung-gedung pemerintah, rumah Negara golongan III, drainase, jalan lingkungan dan jaringan air bersih.
  - d. Keterbatasan alokasi anggaran untuk penanganan program dan kegiatan Bidang Cipta Karya.

4. Bidang Sumber Daya Air :

- a. Terbatasnya kemampuan dan keterampilan SDM di bidang Sumber Daya Air yang disebabkan minimnya kegiatan pendidikan maupun pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM terutama dalam hal penyusunan rencana program dan rencana teknis.
- b. Banyaknya lokasi banjir yang belum bisa ditangani secara optimal.
- c. Banyaknya Bangunan Irigasi / Rawa yang dalam keadaan rusak ringan dan berat sehingga memerlukan pemeliharaan berkala dan rutin.
- d. Banyaknya saluran di daerah irigasi / rawa yang dangkal sehingga memerlukan perbaikan dan dinormalisasi supaya saluran dapat berfungsi kembali.
- e. Terbatasnya dana yang dialokasikan pada bidang Sumber Daya Air sehingga banyak DI/DR yang memerlukan sarana / prasarana irigasi / rawa sehingga belum bisa optimal dalam melayani jaringan irigasi.

### 3.1.2 PENATAAN RUANG

1. Bidang Tata Ruang :

- a. Kualitas sarana dan prasarana penunjang kinerja Bidang Tata Ruang masih sangat minim yang disebabkan adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah pada awal Tahun 2023. Beberapa sarana dan prasarana penunjang kinerja yang perlu dipenuhi antarlain Kendaraan Operasional (1 unit Roda Empat dan 2 unit Roda Dua), 1 Unit Komputer yang memiliki spek tinggi untuk operasional Sistem Informasi Geografis / GIS dan pelayanan publik (informasi lahan), TV/Monitor layar lebar untuk rapat dan pelayanan publik informasi lahan (1 unit), Meja dan Kursi untuk Eselon 4 (sebanyak 1 Unit), Meja dan Kursi Rapat (1 Unit Meja dan 7 Unit Kursi), Meja dan Kursi Ruang Tunggu (1 unit), Meja dan Kursi Pelayanan (1 unit Meja dan 12 unit).
- b. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas aparatur yang profesional di Bidang Tata Ruang. Hingga 2023, jumlah personil Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Mempawah hanya berjumlah 5 (lima) orang dan belum ada personil yang merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Tata Ruang. Sehingga diperlukan penambahan personil minimal sebanyak 2 orang dengan rincian 1 orang personil untuk pemetaan (Geodesi) dan 1 orang personil untuk perencanaan tata ruang (Planologi/Perencana Wilayah Kota). Selain itu pengembangan kapasitas aparatur penataan ruang perlu ditingkatkan melalui keikutsertaan aparatur dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan seperti Penyusunan Rencana Tata Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Penyusunan Peraturan Zonasi, PPNS, Pelatihan Sistem Informasi Geografis/GIS dan lain sebagainya.

- c. Belum tersedianya Sistem Informasi Tata Ruang yang handal, yang dapat berfungsi dalam mensosialisasikan peraturan-peraturan terkait tata ruang kepada masyarakat luas, meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, sekaligus dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik di Bidang Tata Ruang.
- d. Seiring berkembangnya pembangunan sarana dan prasarana wilayah, sebagai kawasan penunjang Pontianak Metropolitan Area (PMA),serta telah ditetapkannya Kecamatan Sungai Kunyit sebagai lokasi Pelabuhan Internasional dan Kawasan Ekonomi Khusus, maka menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di Kabupaten Mempawah. Kondisi tersebut memerlukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mempawah yang telah menjadi PERDA.
- e. Masih terdapat beberapa wilayah di Kabupaten Mempawah yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (*Zoning Regulation*) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sehingga kegiatan penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi perlu menjadi prioritas agar kegiatan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang memiliki kekuatan hukum.
- f. Belum tersedianya beberapa Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Mempawah yaitu Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan Ekonomi (Kawasan Industri Sei.

- Kunyit, Kawasan Industri Jongkat, Kawasan Perdagangan Sei. Pinyuh), Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan Sosial Budaya (Kawasan Keraton Amantubillah, Kawasan Makam Habib Husein, dan Kawasan Cagar Budaya Sebukit).
- g. Optimalisasi peran Forum Penataan Ruang (FPR) Kabupaten Mempawah dalam rangka perencanaan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu FPR Kabupaten Mempawah juga memegang peranan penting pelayanan publik dalam pelayanan perijinan berusaha dan non berusaha. Sehingga fasilitasi terhadap kegiatan koordinasi FPR dan peninjauan lapangan sangat penting untuk dilakukan agar menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
  - h. Keterbatasan alokasi anggaran untuk penanganan program dan kegiatan Bidang Tata Ruang.

Dari permasalahan tersebut diatas, maka hal-hal yang perlu dilakukan:

1. Sekretariat :
  - a. Peran aktif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah masih perlu ditingkatkan
  - b. Optimalisasi Sumber Daya Manusia yang ada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dengan menempatkannya berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalamannya serta pengajuan personil baru yang dibutuhkan
  - c. Peningkatan profesionalisme kerja melalui pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun fungsional.
  - d. Optimalisasi dan penambahan sarana dan prasarana kantor serta melaksanakan pemeliharaan yang baik.
2. Bidang Bina Marga :
  - a. Penetapan SK Jalan Kabupaten dan penyusunan data base perencanaan program yang lengkap dan valid melalui kegiatan survey dan pemutakhiran data pendukung perencanaan (program dan teknis) guna mendukung kebijakan penyelenggaraan jalan

- Kabupaten (berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan) dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan, penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten (termasuk jembatan), penetapan status jalan kabupaten (termasuk jembatan) dan penyusunan perencanaan jaringan jalan kabupaten.
- b. Secara terprogram melakukan pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para SDM (aparatur) penyelenggara jalan kabupaten bekerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melalui Institusi maupun lembaga yang berkompeten dalam rangka peningkatan kapasitas SDM terutama dalam hal penyusunan rencana (program dan teknis).
  - c. Tercukupinya kebutuhan akan sarana dan prasarana penunjang aktifitas kerja terutama yang berkaitan sarana survey, penelitian, mobilitas dan sebagainya.
3. Bidang Cipta Karya :
- a. Perlu adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk mensosialisasikan PBG di setiap Perangkat Daerah dan Masyarakat secara luas.
  - b. Secara terprogram melakukan pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para SDM (aparatur) penyelenggara jalan kabupaten bekerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melalui Institusi maupun lembaga yang berkompeten dalam rangka peningkatan kapasitas SDM terutama dalam hal penyusunan rencana (program dan teknis).
  - c. Tersedianya database dan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah yang dapat memberikan informasi mengenai Persetujuan Bangunan Gedung, Jalan lingkungan, drainase, air minum dan sanitasi lingkungan.
  - d. Mencari sumber pendanaan lain selain dari APBD Kabupaten Mempawah.

4. Bidang Sumber Daya Air :

- a. Terpeliharanya alur sungai dan tebing sungai.
- b. Terpeliharanya prasarana SDA (Jaringan Pengairan).
- c. Berfungsinya bangunan dan jaringan irigasi / rawa.
- d. Bertambahnya jumlah bangunan irigasi, saluran dan tanggul.
- e. Perlu reviu design data irigasi (mempergunakan GIS).
- f. Tersedianya Air Baku Irigasi dan Rawa
- g. Terkendalinya Daerah Banjir
- h. Secara terprogram melakukan pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para SDM (aparatur) penyelenggara jalan kabupaten bekerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melalui Institusi maupun lembaga yang berkompeten dalam rangka peningkatan kapasitas SDM terutama dalam hal penyusunan rencana (program dan teknis).
- i. Mencari sumber pendanaan lain selain dari APBD Kabupaten Mempawah.

i. Bidang Tata Ruang :

- a. Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas dan modern sebagai penunjang kinerja Bidang Tata Ruang terutama untuk pelayanan publik. Prioritas hingga 2023 antara lain Kendaraan Operasional (2 unit Roda Dua), 1 Unit Komputer yang memiliki spek tinggi untuk operasional Sistem Informasi Geografis / GIS dan pelayanan publik (informasi lahan), TV/Monitor layar lebar untuk rapat dan pelayanan publik informasi lahan (1 unit), Meja dan Kursi untuk Eselon 4 (sebanyak 1 Unit), Meja dan Kursi Ruang Tunggu (1 unit), Meja dan Kursi Pelayanan (1 unit Meja dan 12 unit).
- b. Peningkatan jumlah dan kualitas aparatur yang professional di Bidang Tata Ruang. Hingga 2023, diharapkan personil Tata Ruang minimal berjumlah 7 (tujuh) orang (penambahan 2 orang personil 1 orang untuk pemetaan/Geodesi dan 1 orang untuk perencanaan tata ruang/Planologi/Perencana Wilayah Kota) dan sudah memiliki minimal satu orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Tata Ruang.

Selain itu, aparatur Bidang Tata Ruang juga harus aktif dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan Penyusunan Rencana Tata Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Penyusunan Peraturan Zonasi, PPNS, Pelatihan Sistem Informasi Geografis/GIS dan lain sebagainya.

- c. Tersedianya Sistem Informasi Tata Ruang yang handal berupa website maupun aplikasi android, yang dapat berfungsi dalam mensosialisasikan peraturan-peraturan terkait tata ruang kepada masyarakat luas, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang (pengaduan masyarakat terkait pelanggaran tata ruang), sekaligus dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik di Bidang Tata Ruang (informasi arahan lahan).
- d. Hingga Tahun 2023 diharapkan telah dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mempawah seiring dengan perkembangan sarana prasarana wilayah, isu-isu strategis pembangunan wilayah, melibatkan serta menjaring aspirasi seluruh stakeholders pembangunan yang ada di Kabupaten Mempawah.
- e. Memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah sebagai salah satu instrumen dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- f. Tersedianya Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Mempawah yaitu Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan Ekonomi (Kawasan Industri Sei. Kunit, Kawasan Industri Jongkat, Kawasan Perdagangan Sei. Pinyuh), Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan Sosial Budaya (Kawasan Keraton Amantubillah, Kawasan Makam Habib Husein, dan Kawasan Cagar Budaya Sebukit).
- g. Optimalisasi peran Forum Penataan Ruang (FPR) Kabupaten Mempawah dalam rangka perencanaan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang. Sehingga diharapkan fasilitasi dan koordinasi antar instansi yang tergabung dalam FPR dapat secara intensif terus dilakukan.

- h. Mencari sumber pendanaan lain selain dari APBD Kabupaten Mempawah.

### **3.2 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mempawah 2014-2034, telah ditetapkan Struktur Ruang Wilayah, Pola Ruang Wilayah, dan Pengembangan Kawasan Strategis yang ada pada wilayah Kabupaten Mempawah dalam sinergitas pengembangan wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Pulau Kalimantan, dan NKRI secara keseluruhan. Selain itu, dalam Perda RTRW ini juga telah diatur beberapa Ketentuan Umum Peraturan Zonasi, Indikasi Program Pemanfaatan Ruang, dan lain sebagainya terkait arahan dalam upaya penyelenggaraan penataan ruang wilayah di Kabupaten Mempawah berdasarkan peraturan perundangan yang terkait dan masih berlaku sebelum lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja.

Dalam rencana struktur ruang telah ditetapkan hierarki pusat-pusat kegiatan dan rencana-rencana pengembangan utilitas di Kabupaten Mempawah. Telaah terhadap aspek struktur ruang yang telah ditetapkan dalam Perda RTRW Kabupaten Mempawah tersebut pastinya telah mempertimbangkan beberapa hal penting sebagai berikut:

- Luasan Wilayah dan Jumlah Wilayah Administrasi yang ada, dimana luasan wilayah Kabupaten Mempawah ditetapkan sebesar 1.935,42 km<sup>2</sup> (luasan wilayah daratan dan wilayah laut) dan terbagi menjadi 9 kecamatan yang terdiri dari 60 Desa serta 7 Kelurahan. Luasan wilayah Kabupaten Mempawah ini semakin mengecil dari sebelumnya karena telah 2 kali terjadi pemekaran wilayah, yaitu Kabupaten Landak (1999) dan Kabupaten Kubu Raya (2007). Terbatasnya luasan wilayah ini akan semakin mempermudah dalam mengendalikan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan/pemanfaatan ruang, namun harus lebih selektif dalam memilih investasi dan pembangunan/pemanfaatan ruang yang akan dilakukan agar dapat memberikan dampak positif yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat.

- Potensi Strategis dan Karakteristik Fisik Wilayah, dimana wilayah Kabupaten Mempawah berada diantara 2 kutub pertumbuhan kota, yaitu diantara Kota Pontianak dan Kota Singkawang yang telah terhubung oleh jaringan jalan arteri/utama. Sehingga posisi strategis ini harus dipandang sebagai peluang/tantangan dalam pengembangan daerah dan bukan dianggap sebagai kelemahan/ancaman/factor penghambat dalam pengembangan Kabupaten Mempawah. Selain itu, karakteristik wilayah dari 6 kecamatan yang ada merupakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan terdapat sekitar 10 pulau kecil, dan 3 kecamatan lainnya (Anjongan, Toho, dan Sadaniang) memiliki karakteristik fisik wilayah yang hampir sama yakni perbukitan.

Dalam ketetapan pola ruang wilayah juga telah ditetapkan peruntukan ruang di Kabupaten Mempawah, yang terdiri dari peruntukan kawasan binaan/budidaya dan nonbinaan/nonbudidaya. Telaah terhadap aspek pola peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam Perda RTRW Kabupaten Mempawah tersebut telah mempertimbangkan beberapa hal antarlain:

- ❖ Proporsi Kawasan Budidaya dan Non Budidaya dengan perbandingan maksimal 70% untuk kawasan Budidaya dan 30% untuk kawasan Non Budidaya.
- ❖ Kawasan Hutan Lindung hingga Kawasan Perlindungan Setempat seperti sempadan sungai dan sempadan pantai.

Terkait pengembangan kawasan strategis, di Kabupaten Mempawah terdapat beberapa Proyek Strategis Nasional yang pada saat ini mulai memperlihatkan "Multiplier Effect" yang cukup kuat bagi perkembangan wilayah Kabupaten Mempawah, diantaranya Pembangunan Pelabuhan Kijing dan Pembangunan Smelter ANTAM-BAI di Sungai Kunyit, serta rencana Pembangunan Jembatan Kapuas 3 di Kecamatan Jongkat sebagai salah satu upaya solusi mengurai kemacetan di Pontianak Metropolitan Area. Animo investor untuk memanfaatkan ruang wilayah Kabupaten Mempawah terus meningkat sejak 2017, terutama pada lokasi yang diperuntukkan sebagai kawasan peruntukan industry dan kawasan penunjangnya. Bahkan pada lokasi pusat-pusat permukiman dan perdagangan jasa di sepanjang jalan arteri primer yang menghubungkan Kota Pontianak dan Kota Singkawang terlihat semakin bersemangat untuk tumbuh dan berkembang.

Dari aspek lingkungan hidup, upaya-upaya dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam kondisi kenaikan grafik pemanfaatan ruang yang sangat signifikan tersebut harus semakin ditingkatkan. Karena apabila upaya pengendalian pemanfaatan ruang tidak dilakukan maka dikhawatirkan akan terjadi kerusakan lingkungan terutama pada kawasan pesisir pantai dan kawasan yang memiliki sumber daya alam untuk diolah dan dimanfaatkan. Ekosistem mangrove dan pantai akan terancam kelestariannya, ekosistem sungai akan menunggu kehancuran, ekosistem gambut rusak dan terbakar pada musim kemarau serta menjadi factor utama bencana kabut asap yang melanda setiap tahunnya.

Tidak dapat dipungkiri masuknya investasi industri dan pembangunan akan memberikan dampak bagi perekonomian local masyarakat dan daerah, namun pertimbangan akan kelestarian lingkungan dan daya dukung lahan harus menjadi prinsip yang tidak boleh dihilangkan begitu saja. Keseimbangan antara penataan ruang wilayah, pengembangan investasi dan perekonomian wilayah, serta kelestarian ekosistem lingkungan hidup harus berjalan sinkron dan sinergi. Rencana tata ruang wilayah harus dapat memetakan secara spasial potensi perkembangan wilayah dan potensi terjadinya perubahan fungsi lahan akibat adanya dampak dari pembangunan yang dilakukan, terutama alih fungsi terhadap lahan pertanian tanaman pangan pada kawasan-kawasan yang memang terdampak adanya proyek strategis nasional.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan menata ruang wilayah Kabupaten Mempawah yang aman, nyaman, dan produktif tersebut, maka konsistensi pembangunan terhadap rencana tata ruang wilayah harus dapat terus dikendalikan untuk menjaga kelestarian lingkungan dalam konsep pengembangan "*green economy*" dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan hidup. Produk dan aturan tata ruang tidak bisa dianggap sebagai penghambat investasi, namun harus dapat memberikan solusi terhadap permasalahan daya dukung lingkungan dan pengembangan ekonomi. Tata Ruang dapat bersifat fleksibel (tidak kaku) namun harus tetap tegas dalam upaya menjaga keberlangsungan ekosistem dan pelestarian lingkungan hidup.

Selain berdampak pada lingkungan hidup, sosial budaya masyarakat juga akan terdampak secara langsung sehingga akan terjadi perubahan-perubahan pada pola kehidupan masyarakat, baik perubahan positif maupun perubahan yang mengarah pada hal-hal yang negative. Oleh karena itu persiapan dan pembinaan terhadap masyarakat juga harus terus dilakukan secara continue dan berkesinambungan.

Aspek legal formal (regulasi) spasial kewilayahan menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan dan investasi di Kabupaten Mempawah Hingga saat ini, pedoman teknis dalam memberikan perijinan investasi dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Mempawah hanya terbatas pada sebuah Perda tentang RTRW saja. Sehingga sangat diperlukan upaya percepatan dalam penyusunan Perbup tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Mempawah untuk memberikan kepastian dalam investasi dan pembangunan di daerah baik bagi masyarakat, investor, maupun bagi pemerintah itu sendiri. Dan tentunya diperlukan dukungan anggaran yang memadai dalam menghasilkan sebuah produk perencanaan tata ruang yang berkualitas dan dapat menjadi pedoman dalam pembangunan di Kabupaten Mempawah, yang dapat meliputi pembangunan jalan jembatan, bangunan Gedung, sanitasi, utilitas perkotaan, pembangunan sosial budaya masyarakat, dan lain sebagainya.

### **3.3 Penentuan Isu-isu Strategis**

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisa berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis agar dapat selaras dengan kebutuhan/harapan masyarakat serta sinkron dengan kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Adapun isu-isu strategis yang ditentukan dalam periode 2025 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan anggaran pembiayaan yang memerlukan pemilahan skala prioritas dan pencarian sumber-sumber pendanaan lainnya selain dari APBD Kabupaten Mempawah.
2. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Dinas PUPR Kabupaten Mempawah yang perlu diatasi dengan penambahan jumlah personal dan

pengembangan kompetensi SDM melalui diklat dan pelatihan-pelatihan teknis terkait.

3. Keterbatasan prasarana dan sarana penunjang pelaksanaan tupoksi yang perlu diatasi dengan penyediaan sarpras penunjang untuk meningkatkan kinerja setiap bidang.
4. Menurunnya kondisi kemantapan jalan dan jembatan pada beberapa ruas jalan akibat dari perubahan iklim, anomali cuaca, bencana banjir, dan overload atau pembebanan yang berlebihan pada ruas jalan tersebut.
5. Minimnya ketersediaan database terkait pelaksanaan tupoksi keciptakarya yang meliputi Bangunan Gedung, Rumah Negara Golongan III, drainase, jalan lingkungan, jaringan air bersih, hingga data terkait PBG/SLF.
6. Optimalisasi anggaran untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa yang ada.
7. Masih terdapat beberapa wilayah di Kabupaten mempawah yang aksesibilitas yang keterjangkauannya belum maksimal.
8. Beberapa Kawasan Perkotaan di wilayah Kabupaten Mempawah belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasikan dengan OSS-RBA, sehingga diperlukan dukungan pendanaan dari APBD dan sumber lainnya guna mendukung investasi dan percepatan Pembangunan wilayah Kabupaten Mempawah.
9. Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan.

Selain itu, isu-isu strategis juga merupakan salah satu sumber masukan dalam melakukan analisis lingkungan eksternal dan internal terhadap proses perencanaan. Jika analisis lingkungan eksternal dan internal diidentifikasi dengan baik dan tepat maka pemerintahan daerah dalam 2 (dua) tahun kedepan akan dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyesuaikan atau memperhatikan isu strategisnya kemungkinan akan menghadapi hambatan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya atau tidak berhasil dalam mencapaitujuan pembangunan daerah.

Dengan demikian, isu – isu strategis adalah hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang cukup signifikan bagi



pemangku kepentingan (stakeholders) dimasa datang. Oleh karena itu, dalam melakukan perumusan isu – isu strategis ini terlebih dahulu perlu mencermati berbagai fakta dan informasi mengenai kinerja Pemerintahan Kabupaten Mempawah 5 (lima) tahun yang lalu.



## BAB IV

# TUJUAN DAN SASARAN

*Halaman 33 - 51*

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH**

##### **4.2.1 TUJUAN**

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah dan merupakan suatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) Tahun, yang menggambarkan arah strategik organisasi.

Tujuan diperlukan guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Sebagai penjabaran dari Misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program.

Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya merupakan outcome dari suatu atau kumpulan sasaran/program/kegiatan.

Adapun yang menjadi tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup; dan
2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Kewilayahan.

##### **4.2.2 SASARAN**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.



Adapun sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang.
2. Meningkatnya Kualitas Lauanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/Perdesaan.
3. Meningkatnya Ketersediaan Air yang Berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten.
5. Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi dan standar Bangunan Gedung Negara.
6. Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum Permukiman Perkotaan/Perdesaan.

Dari uraian tersebut diatas dapatlah dilihat pada tabel T-C.25 tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah berikut dibawah ini :



Tabel T-C.25  
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MEMPAWAH  
PERIODE 2025 - 2026

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -	
				2025	2026
1	2	3	4	7	8
1.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.1 Persentase Penyelenggaraan Penetapan, Perencanaan, Pemanfaatan serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang	44,00	56,00
		2. Meningkatnya Kualitas Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/Perdesaan	2.1 Persentase Akses Layanan Sanitasi (Air limbah) Permukiman Perkotaan/Perdesaan	88,00	88,50
		3. Meningkatnya Ketersediaan air yang Berkelanjutan untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat	3.1 Persentase Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada Sesuai dengan Kewenangan	56,00	58,00
2.	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Kewilayahan	1. Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten	1.1 Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	62,55	63,30
		2. Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung sesuai dengan Fungsi dan Standar Bangunan Gedung Negara	2.1 Persentase Bangunan Gedung yang dibangun dalam kondisi baik	72,00	73,00
		3. Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum Permukiman Perkotaan/Perdesaan	3.1 Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman dan Layak Melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan dengan Kebutuhan Pokok Minimal 60 Liter Perorang Per Hari	75,00	75,50

## **4.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **4.1 STRATEGI**

Strategi merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi ini akan memperjelas pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi meliputi penetapan kebijakan dan program yang menunjukkan konsekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional dari aktivitas organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi serta misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah.

### **4.2 ARAH KEBIJAKAN**

Kebijakan adalah sebagai arah untuk dijadikan pedoman dalam menyusun program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan, misi, dan Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah.

Untuk lebih jelas mengenai strategi dan arah kebijakan yang ditempuh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel T-C.26  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.1 Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja Bidang Tata Ruang	1.1 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas dan modern sebagai penunjang kinerja Bidang Tata Ruang terutama dalam menunjang kualitas pelayanan publik
		1.2 Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur yang profesional di Bidang Tata Ruang	1.2 Meningkatkan jumlah dan kualitas aparatur yang profesional di Bidang Tata Ruang dan telah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan Penyusunan Rencana Tata Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Penyusunan Peraturan Zonasi, PPNS Penataan Ruang, Pelatihan Sistem Informasi Geografis/GIS dan lain sebagainya
		1.3 Penyediaan Sistem Informasi Tata Ruang Kabupaten Mempawah	1.3 Menyediakan sistem informasi tata ruang yang handal dan dapat berfungsi mensosialisasikan peraturan terkait tata ruang, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan tata ruang (pengaduan masyarakat terkait pelanggaran, sekaligus dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik di Bidang Tata Ruang (informasi arahan lahan)
		1.4 Peningkatan kualitas dan kuantitas Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan rencana rinci tata ruang agar seiring dengan perkembangan sarana prasarana wilayah, isu-isu strategis pembangunan wilayah serta melibatkan/ menjangkau aspirasi seluruh stakeholders pembangunan yang ada di Kabupaten Mempawah	1.4 Meningkatkan kualitas dan kuantitas Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan rencana rinci tata ruang agar seiring dengan perkembangan sarana prasarana wilayah, isu-isu strategis pembangunan wilayah serta melibatkan/menjangkau aspirasi seluruh stakeholders pembangunan yang ada di Kabupaten Mempawah
		1.5 Peningkatan ketersediaan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri dari peraturan zonasi, perijinan, insentif dan disinsentif, serta sanksi terhadap pelanggaran tata ruang	1.5 Meningkatkan ketersediaan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri dari peraturan zonasi, perijinan, insentif dan disinsentif, serta sanksi terhadap pelanggaran tata ruang



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Kewilayahan		1.6 Penyediaan dokumen rencana Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan Ekonomi dan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan Sosial Budaya	1.6 Menyediakan dokumen rencana Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan Ekonomi dan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan Sosial Budaya
		1.7 Optimalisasi peran Forum Penataan Ruang (FPR) Kabupaten Mempawah dalam rangka perencanaan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian	1.7 Mengoptimalkan peran Forum Penataan Ruang (FPR) Kabupaten Mempawah dalam rangka perencanaan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang
		1.8 Optimalisasi penyampaian informasi terkait tata ruang dan rencana tata ruang kepada masyarakat	1.8 Mengembangkan program dan kegiatan terkait sosialisasi kebijakan tata ruang dan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang
	2. Meningkatnya Kualitas Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/Perdesaan	2.1 Meningkatkan kualitas Database Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/Perdesaan	2.1 Pemutakhiran dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) atau Studi EHRA
		2.2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/Perdesaan	2.2 Mengoptimalkan anggaran untuk pelayanan standar Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/Perdesaan melalui Dana DAK dan DAU
	3. Meningkatnya Ketersediaan air untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat yang Berkelanjutan	3.1 Meningkatkan fungsi jaringan irigasi dan rawa serta mengendalikan banjir dan melakukan konservasi sumber daya air	3.1 Mengoptimalkan anggaran untuk meningkatkan fungsi jaringan irigasi dan rawa serta mengendalikan banjir dan melakukan konservasi sumber daya air
	4. Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten	4.1 Meningkatkan Kualitas Data Base Jalan	4.1 Penetapan Status Jalan Kabupaten dan Pemutakhiran Data Base Jalan Per tahun
		4.2 Memprioritaskan Penanganan Ruas Jalan Yang Kondisinya Rusak Ringan dan Rusak Berat Menjadi Baik	4.2 Pemilihan Konstruksi Yang Lebih mapan Sehingga Umur Rencana Dapat dicapai Sehingga Dapat Meminimalkan Biaya Pemeliharaan
		4.3 Mempertahankan Kondisi Baik dan Sedang Sehingga Tidak Terjadi Penurunan Kondisi	4.3 Memperkuat Aspek Pemeliharaan Baik Yang Dilakukan Pihak Ketiga Maupun Yang dilakukan Secara Swakelola
		4.4 Memperkuat Data Base Jembatan	4.4 Pemutakhiran Data Base Jembatan Per tahun
4.5 Memprioritaskan Jembatan Yang Kondisinya Rusak		4.5 Penanganan Pemeliharaan Sesuai Dengan Kebutuhan melalui kegiatan swakelola dan pihak ketiga	
4.6 Pembangunan Maupun Penggantian Jembatan Sesuai Standar Kebutuhan		4.6 Memperkuat Aspek Perencanaan Untuk Pembangunan Jembatan Baru atau Pengganti	



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	5. Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung sesuai dengan Fungsi dan Standar Bangunan Gedung Negara	5.1 Meningkatkan kualitas database bangunan gedung dan kualitas pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung	5.1 Pemutakhiran database bangunan gedung per tahun dan Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung
		5.2 Prioritas pembangunan gedung sarana prasanana aparatur	5.2 Pembangunan secara bertahap dengan target bangunan sesuai dengan standar perencanaan bangunan gedung dan umur bangunan gedung
		5.3 Pemeliharaan bangunan gedung secara berkala	5.3 Penganggaran pemeliharaan bangunan gedung sesuai database bangunan dan periodik pemeliharaan bangunan
	6. Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum Permukiman Perkotaan/Perdesaan	6.1 Meningkatkan kualitas Database Air Bersih dan Air Minum	6.1 Pemutakhiran database jaringan air bersih dan air minum
		6.2 Pembangunan baru Instalasi Pengelolaan Air dengan Kapasitas 300 l/detik	6.2 Mengoptimalkan pelayanan sambungan rumah untuk air bersih serta mengurangi tingkat kebocoran air (nrw)
		6.3 Pemeliharaan bangunan sarana pengelolaan air bersih	6.3 Penganggaran pemeliharaan bangunan sarana pengolahan air bersih dan air minum



Cascading Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Mempawah Tahun 2025 - 2026

Ieu Strategis	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target 2025	Target 2026	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target 2025	Target 2026
OPTIMALISASI PELAYANAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	MENINGKATKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	MENINGKATKAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PADA PERANGKAT DAERAH	76,65 NILAI	77,50 NILAI	80,00 NILAI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	73,5 %	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan per	100 %	100 %
												Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen
												Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
												Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen
												Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
												Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen
												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan
												Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan administrasi keuangan	100 %	100 %
												Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	75 Orang/bulan
												Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	650 Dokumen	650 Dokumen
												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan



Isu Strategis	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target 2025	Target 2026	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target 2025	Target 2026
												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan
												Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi barang milik daerah	100 %	100 %
												Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan
												Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian	100 %	100 %
												Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket
												Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	30 Orang
												Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	100 Persen	100 Persen
												Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
												Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
												Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
												Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
												Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
												Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	35 Laporan
												Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen
												Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %
												Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit
												Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit



Isu Strategis	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target 2025	Target 2026	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target 2025	Target 2026
												Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit
												Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit
												Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit
												Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit
												Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %
												Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan
												Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan
												Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %
												Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit
												Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	38 Unit
												Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit
												Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	12 Unit
												Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit	23 Unit
MENINGKATKAN INFRA-STRUKTUR YANG BER-ORIENTASI	MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya Ketersediaan Air yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan	Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian masyarakat pada	55 %	56 %	58 %	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	58 %	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantal pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantal pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1	Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantal	56 %	58 %



Ibu Strategis	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target 2025	Target 2026	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target 2025	Target 2026	
PELAYANAN, BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN			masyarakat	sistem yang sudah ada sesuai dengan kewenangan									(Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
												Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	14 Unit	19 Unit	
												Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	200 Lembaga	200 Lembaga	
												Normalisasi/Restorasi Sungai	Terlaksananya Normalisasi/ Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	142.5 KM	142.5 KM	
												Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	9.5 KM	9.5 KM	
												Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Terbangunnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	24 Unit	24 Unit	
												Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder	56 %	56 %	
													Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Terbangunnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	4.75 KM	4.75 KM
													Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	4.75 KM	4.75 KM
													Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	60 KM	60 KM
												Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	
	MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI	Meningkatnya Kualitas Layanan Air Bersih/Air Minum Pemukiman Perkotaan/Perdesaan	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih/air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terfindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 ltr perorang perhari	73,42 %	75 %	75,50 %	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih/Air Minum	70 %	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Akses Air Bersih yang tersambung ke rumah penduduk	67 %	70 %	
												Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	1800 Unit	2000 Unit	
												Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	
												Peningkatan Sistem	Meningkatnya Kapasitas	Kapasitas Sistem Penyediaan Air	20	20	



Isu Strategis	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target 2025	Target 2026	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target 2025	Target 2026
												Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/Detik	Liter/Detik
												Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	100 Liter/Detik	100 Liter/Detik
												Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit	2 Unit
												Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Teroptimisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	5 Unit	5 Unit
												Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	5812 SR	6812 SR
	MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya Kualitas Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/Perdesaan	Persentase Akses Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/Perdesaan	86,74 %	88 %	88,50 %	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	73 %	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Akses Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/Perdesaan	70 %	73 %
												Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	25000 M <sup>3</sup> /Hari	26000 M <sup>3</sup> /Hari
												Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	0,16 M <sup>3</sup> /Hari	8 M <sup>3</sup> /Hari
												Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	0,08 M <sup>3</sup> /Hari	0,16 M <sup>3</sup> /Hari
												Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	120 Rumah Tangga	250 Rumah Tangga
												Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	20 M <sup>3</sup> /Hari	20 M <sup>3</sup> /Hari
												Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen
	MENINGKATKAN KUALITAS PEMENUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI	Meningkatnya Sistem Drainase yang Terintegrasi dan Efektif	Persentase Sarana dan Prasarana Drainase berfungsi dengan baik dan siap Operasional	37 %	38,50 %	39 %	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	61 %	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Luas Wilayah Cakupan Drainase	20 %	25 %
												Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	500 M	500 M



Isu Strategis	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target 2025	Target 2026	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target 2025	Target 2026
												Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	Tersedianya Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan	10 Unit	12 Unit
												Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	5 Dokumen	8 Dokumen
												Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	500 Sistem Drainase Perkotaan	500 Sistem Drainase Perkotaan
	MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung sesuai dengan Fungsi dan Standar Bangunan Gedung Negara	Persentase bangunan gedung yang dibangun dalam kondisi baik	70 %	72 %	73 %	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Tertata dengan Baik sesuai Fungsi dan Standar Bangunan Gedung Negara	52 %	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pembertan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pembertan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung Negara	55 Unit	55 Unit
												Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	40 Bangunan Gedung	40 Bangunan Gedung
												Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	20 Dokumen	20 Dokumen
												Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Bangunan Gedung yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraannya	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	20 Orang	20 Orang
												Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	75 Dokumen	75 Dokumen
	MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI	Meningkatnya Infrastruktur Bangunan Gedung dan Lingkungannya yang Berkondisi Baik	Persentase Jalan lingkungan Bangunan Gedung dan Lingkungannya Berkondisi Baik	25 %	26 %	27 %	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Jalan Lingkungan	56,90 %	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	30 %	40 %



Ieu Strategis	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target 2025	Target 2026	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target 2025	Target 2026
												Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	30 Dokumen	30 Dokumen
												Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	500 Kawasan	500 Kawasan
												Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	30 Dokumen	30 Dokumen
	MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	KONDISI JALAN MANTAP	Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten	Persentase Jalan kabupaten dalam kondisi mantap (Balk dan Sedang)	60,95 Persen	61,75 Persen	62,55 Persen	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	62,55 %	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Persentase Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap	61,75 %	62,55 %
												Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen
												Penggantian Jembatan	Tergantinya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	2 Jembatan	2 Jembatan
												Pembangunan Jalan	Terbangunnya Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	0,696 KM	0,600 KM
												Rekonstruksi Jalan	Terekonstruksinya Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	28,279 KM	22,823 KM
												Pemeliharaan Berkala Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1,468 KM	1,432 KM
												Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	3 Jembatan	3 Jembatan
												Rehabilitasi Jembatan	Terehabilitasinya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	3 Jembatan	3 Jembatan
												Pembangunan Jembatan	Terbangunnya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	2 Jembatan	2 Jembatan
												Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	632,073 KM	632,073 KM
												Rehabilitasi Jalan	Terehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1,492 KM	1,044 KM
												Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1,400 KM	1,200 KM
												Pelebaran Jembatan	Jembatan yang mendapatkan Pelebaran	Jumlah Jembatan yang Dilebarkan	3 Jembatan	3 Jembatan
	MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	KONDISI JALAN MANTAP	Meningkatnya Layanan Informasi Jasa Konstruksi Pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Persentase Tersedianya Tenaga Kerja Terampil dan Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1 %	1,3 %	1,5 %	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya Layanan Informasi Jasa Konstruksi pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi	20 %	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi	10 %	20 %



Ieu Strategis	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target 2025	Target 2026	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target 2025	Target 2026
												Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Terterselenggaranya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	100 Orang	100 Orang
												Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	150 Lembaga	150 Lembaga
												Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Terpantau dan Terevaluasinya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihnnya	30 Dokumen	30 Dokumen
												Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	100 Orang	100 Orang
												Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan Informasi jasa konstruksi	20 %	40 %
												Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	10 Perangkat Pendukung	10 Perangkat Pendukung
												Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen
												Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase jumlah dokumen izin usaha jasa konstruksi	5 %	5 %
												Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi	Terpantau dan Terevaluasinya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi	5 Dokumen	5 Dokumen
												Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Meningkatnya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase dokumen pengawasan	7 %	7 %
												Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	3 Paket Pekerjaan	3 Paket Pekerjaan
												Penyusunan SOP/Pedoman	Tersusunnya	Jumlah SOP/Pedoman Tertib	4 Dokumen	4 Dokumen



Isu Strategis	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target 2025	Target 2026	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target 2025	Target 2026
												Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun		
	MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penetapan, Perencanaan, Pemanfaatan Serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang	33 %	44 %	56 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatkannya kualitas penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Mempawah meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka pelaksanaan Sustainable Development dan pelaksanaan pembangunan yang sesuai rencana Tata Ruang	Persentase kualitas penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Mempawah meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka pelaksanaan Sustainable Development	56 %	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	56 %	56 %
												Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen
												Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen
												Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen
												Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Tersampainya Informasi penataan ruang kepada masyarakat	Jumlah publikasi Informasi penataan ruang	1 Publikasi	1 Publikasi
												Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota	Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen
												Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	1 Dokumen	0 Dokumen
												Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/ Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen
												Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen
												Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan	Tersampainya substansi pengaturan	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	100 Orang	100 Orang



Ibu Strategis	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target 2025	Target 2026	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target 2025	Target 2026
												pedoman Bidang Penataan ruang	bidang penataan ruang kepada pemangku kepentingan			
												Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terseleenggaranya Koordinasi & Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kab/Kota	Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	56	56
												Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen
												Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen
												Penyusunan Peta Dasar	Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	1 Peta	1 Peta
												Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen
												Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	5 Orang	5 Orang
												Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terseleenggaranya Koordinasi & Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota	Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	100 %	100 %
												Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen
												Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	12 Layanan	12 Layanan
												Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen



Isu Strategis	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target 2025	Target 2026	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target 2025	Target 2026
												Sistem Informasi dan komunikasi penataan ruang	Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen
												Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terseleenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100	100
												Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Kegiatan yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1 Kasus	1 Kasus
												Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen
												Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	1 Laporan	1 Laporan
												Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Terlaksananya Audit Tata Ruang	Jumlah kasus Indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	1 Kasus	1 Kasus
												Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	1 Kasus	1 Kasus
												Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen
												Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1 Laporan	1 Laporan
												Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Terlaksananya pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	1 Dokumen	1 Dokumen
												Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	1 Dokumen
												Penilaian Perwujudan RTR	Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	1 Dokumen	1 Dokumen
												Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Terselesaikan sengketa penataan ruang	Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penataan ruang	1 Berita Acara	1 Berita Acara
												Pengawasan Standar	Terlaksananya	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen



Isu Strategis	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target 2025	Target 2026	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target 2025	Target 2026
												Pelayanan Bidang Penataan Ruang	memenuh Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Memenuh Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang		
												Pemberian Insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Terlaksananya Pemberian Insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian Insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1 Berita Acara	1 Berita Acara



# BAB V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

*Halaman 52 - 55*

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

##### **5.1.1 STRATEGI**

Strategi merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi ini akan memperjelas pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi meliputi penetapan kebijakan dan program yang menunjukkan konsekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional dari aktivitas organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Target dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah.

##### **5.1.2 ARAH KEBIJAKAN**

Kebijakan adalah sebagai arah untuk dijadikan pedoman dalam menyusun program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah.

Untuk lebih jelas mengenai strategi dan arah kebijakan yang ditempuh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel T-C.26  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.1 Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja Bidang Tata Ruang	1.1 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas dan modern sebagai penunjang kinerja Bidang Tata Ruang terutama dalam menunjang kualitas pelayanan publik
		1.2 Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur yang profesional di Bidang Tata Ruang	1.2 Meningkatkan jumlah dan kualitas aparatur yang profesional di Bidang Tata Ruang dan telah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan Penyusunan Rencana Tata Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Penyusunan Peraturan Zonasi, PPNS Penataan Ruang, Pelatihan Sistem Informasi Geografis/GIS dan lain sebagainya
		1.3 Penyediaan Sistem Informasi Tata Ruang Kabupaten Mempawah	1.3 Menyediakan sistem informasi tata ruang yang handal dan dapat berfungsi mensosialisasikan peraturan terkait tata ruang, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan tata ruang (pengaduan masyarakat terkait pelanggaran, sekaligus dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik di Bidang Tata Ruang (informasi arahan lahan)
		1.4 Peningkatan kualitas dan kuantitas Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan rencana rinci tata ruang agar seiring dengan perkembangan sarana prasarana wilayah, isu-isu strategis pembangunan wilayah serta melibatkan/ menjangkau aspirasi seluruh stakeholders pembangunan yang ada di Kabupaten Mempawah	1.4 Meningkatkan kualitas dan kuantitas Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan rencana rinci tata ruang agar seiring dengan perkembangan sarana prasarana wilayah, isu-isu strategis pembangunan wilayah serta melibatkan/menjangkau aspirasi seluruh stakeholders pembangunan yang ada di Kabupaten Mempawah
		1.5 Peningkatan ketersediaan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri dari peraturan zonasi, perijinan, insentif dan disinsentif, serta sanksi terhadap pelanggaran tata ruang	1.5 Meningkatkan ketersediaan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri dari peraturan zonasi, perijinan, insentif dan disinsentif, serta sanksi terhadap pelanggaran tata ruang



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Kewilayahan		1.6 Penyediaan dokumen rencana Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan Ekonomi dan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan Sosial Budaya	1.6 Menyediakan dokumen rencana Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan Ekonomi dan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan Sosial Budaya
		1.7 Optimalisasi peran Forum Penataan Ruang (FPR) Kabupaten Mempawah dalam rangka perencanaan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian	1.7 Mengoptimalkan peran Forum Penataan Ruang (FPR) Kabupaten Mempawah dalam rangka perencanaan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang
		1.8 Optimalisasi penyampaian informasi terkait tata ruang dan rencana tata ruang kepada masyarakat	1.8 Mengembangkan program dan kegiatan terkait sosialisasi kebijakan tata ruang dan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang
	2. Meningkatnya Kualitas Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/Perdesaan	2.1 Meningkatkan kualitas Database Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/Perdesaan	2.1 Pemutakhiran dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) atau Studi EHRA
		2.2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/Perdesaan	2.2 Mengoptimalkan anggaran untuk pelayanan standar Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/Perdesaan melalui Dana DAK dan DAU
	3. Meningkatnya Ketersediaan air untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat yang Berkelanjutan	3.1 Meningkatkan fungsi jaringan irigasi dan rawa serta mengendalikan banjir dan melakukan konservasi sumber daya air	3.1 Mengoptimalkan anggaran untuk meningkatkan fungsi jaringan irigasi dan rawa serta mengendalikan banjir dan melakukan konservasi sumber daya air
	4. Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten	4.1 Meningkatkan Kualitas Data Base Jalan	4.1 Penetapan Status Jalan Kabupaten dan Pemutakhiran Data Base Jalan Per tahun
		4.2 Memprioritaskan Penanganan Ruas Jalan Yang Kondisinya Rusak Ringan dan Rusak Berat Menjadi Baik	4.2 Pemilihan Konstruksi Yang Lebih mapan Sehingga Umur Rencana Dapat dicapai Sehingga Dapat Meminimalkan Biaya Pemeliharaan
		4.3 Mempertahankan Kondisi Baik dan Sedang Sehingga Tidak Terjadi Penurunan Kondisi	4.3 Memperkuat Aspek Pemeliharaan Baik Yang Dilakukan Pihak Ketiga Maupun Yang dilakukan Secara Swakelola
		4.4 Memperkuat Data Base Jembatan	4.4 Pemutakhiran Data Base Jembatan Per tahun
		4.5 Memprioritaskan Jembatan Yang Kondisinya Rusak	4.5 Penanganan Pemeliharaan Sesuai Dengan Kebutuhan melalui kegiatan swakelola dan pihak ketiga
		4.6 Pembangunan Maupun Penggantian Jembatan Sesuai Standar Kebutuhan	4.6 Memperkuat Aspek Perencanaan Untuk Pembangunan Jembatan Baru atau Pengganti



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	5. Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung sesuai dengan Fungsi dan Standar Bangunan Gedung Negara	5.1 Meningkatkan kualitas database bangunan gedung dan kualitas pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung	5.1 Pemutakhiran database bangunan gedung per tahun dan Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung
		5.2 Prioritas pembangunan gedung sarana prasaranana aparatur	5.2 Pembangunan secara bertahap dengan target bangunan sesuai dengan standar perencanaan bangunan gedung dan umur bangunan gedung
		5.3 Pemeliharaan bangunan gedung secara berkala	5.3 Penganggaran pemeliharaan bangunan gedung sesuai database bangunan dan periodik pemeliharaan bangunan
	6. Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum Permukiman Perkotaan/Perdesaan	6.1 Meningkatkan kualitas Database Air Bersih dan Air Minum	6.1 Pemutakhiran database jaringan air bersih dan air minum
		6.2 Pembangunan baru Instalasi Pengelolaan Air dengan Kapasitas 300 l/detik	6.2 Mengoptimalkan pelayanan sambungan rumah untuk air bersih serta mengurangi tingkat kebocoran air (nrw)
		6.3 Pemeliharaan bangunan sarana pengelolaan air bersih	6.3 Penganggaran pemeliharaan bangunan sarana pengolahan air bersih dan air minum



# BAB VI

## RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

*Halaman 56 - 66*

---

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

RPJMD merupakan pedoman bagi OPD dalam menyusun Rencana Strategis. Rencana strategis OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 2 (dua) tahunan. Dengan kata lain, rencana strategis yang disusun oleh setiap OPD pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Mempawah.

Adanya keterkaitan ini menjadikan indikator kinerja SKPD dapat menggambarkan indikator kinerja RPJMD, sehingga capaian setiap OPD akan sangat berpengaruh terhadap capaian RPJMD. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah sebagai salah satu organisasi Pemerintah dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan salah satu fungsi antara lain perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum. Sesuai dengan tugas dan fungsinya tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki peran untuk mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Mempawah dengan mewujudkan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang profesional, terintegrasi, efektif, dan efisien.

Pembiayaan untuk semua anggaran belanja diharapkan dapat dipenuhi oleh APBD Kabupaten Mempawah, walaupun tidak menutup kemungkinan adanya pembiayaan dari APBD Provinsi maupun APBN.

Berikut ini uraian Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Pertahun mulai tahun 2025 – 2026 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah pada Tabel T.C 27 dibawah ini :

**Tabel T-C.27**  
**Rencana Strategi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Kabupaten Mempawah Tahun 2025 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi		
						2025		2026		Target	Rp.			Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.						
		1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				375.516.040.257		380.866.484.617		380.866.484.617				
Meningkatkan Pelayanan Prima Kepada Publik	Meningkatnya IndeK Kepuasan Masyarakat	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	71	72,5	10.526.000.000	73,5	10.576.000.000	73,5	10.576.000.000	DPUPR	Kabupaten Mempawah		
		1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	DPUPR	Kabupaten Mempawah		
		1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	2	8.500.000	1	8.500.000	1	8.500.000				
		1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000				
		1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	3	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000				
		1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000				
		1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	3	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000				
		1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	17.500.000	1	17.500.000	1	17.500.000				
		1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan administrasi keuangan	100	100	7.606.000.000	100	7.606.000.000	100	7.606.000.000	DPUPR	Kabupaten Mempawah		
		1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74	75	7.500.000.000	75	7.500.000.000	77	7.500.000.000				
		1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	600	650	80.000.000	650	80.000.000	750	80.000.000				
		1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	17.500.000	1	17.500.000	1	17.500.000				
		1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	1	8.500.000	1	8.500.000	1	8.500.000				
		1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi barang milik daerah	100	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	DPUPR	Kabupaten Mempawah		
		1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi		
						2025		2026		Target	Rp.			Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.						
		1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administ	100	100	140.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	DPUPR	Kabupaten Mempawah		
		1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000				
		1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25	25	60.000.000	30	60.000.000	55	60.000.000				
		1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	100	100	290.000.000	100	290.000.000	100	290.000.000	DPUPR	Kabupaten Mempawah		
		1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000				
		1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000				
		1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000				
		1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	32.500.000	1	32.500.000	1	32.500.000				
		1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000				
		1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	35	100.000.000	35	100.000.000	45	100.000.000				
		1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3	3	27.500.000	3	27.500.000	3	27.500.000				
		1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	1.655.000.000	100	1.655.000.000	100	1.655.000.000	DPUPR	Kabupaten Mempawah		
		1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	1	550.000.000	1	550.000.000	2	550.000.000				
		1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	2	900.000.000	2	900.000.000	4	900.000.000				
		1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	5	50.000.000	5	50.000.000	10	50.000.000				
		1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	5	50.000.000	5	50.000.000	10	50.000.000				
		1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	4	75.000.000	4	75.000.000	8	75.000.000				
		1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	3	30.000.000	3	30.000.000	6	30.000.000				
		1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	600.000.000	100	650.000.000	100	650.000.000	DPUPR	Kabupaten Mempawah		
		1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	36	400.000.000	36	450.000.000	36	450.000.000				
		1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi		
						2025		2026		Target	Rp.			Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.						
		1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	160.000.000	100	160.000.000	100	160.000.000	DPUPR	Kabupaten Mempawah		
		1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000				
		1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38	38	40.000.000	38	40.000.000	38	40.000.000				
		1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000				
		1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	8	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000				
		1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23	23	20.000.000	23	20.000.000	23	20.000.000				
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Ketersediaan Air yang Berkelanjutan untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	55	56	56.600.000.000	58	57.100.000.000	58	57.100.000.000	DPUPR	Kabupaten Mempawah		
		1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai	55	56	34.100.000.000	58	34.600.000.000	58	34.600.000.000	DPUPR	Kabupaten Mempawah		
		1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	3	14	1.500.000.000	19	2.000.000.000	33	2.000.000.000				
		1.03.02.2.01.0078	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	100	200	100.000.000	200	100.000.000	400	100.000.000				
		1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	31	142,5	10.000.000.000	142,5	10.000.000.000	285	10.000.000.000				
		1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1,1	9,5	20.000.000.000	9,5	20.000.000.000	19	20.000.000.000				
		1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	3	24	2.500.000.000	24	2.500.000.000	48	2.500.000.000				
		1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder	55	56	22.500.000.000	58	22.500.000.000	58	22.500.000.000	DPUPR	Kabupaten Mempawah		

Tujuan	Sasaran	Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
						2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.				
		1.03.02.2.02.0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	1	4,75	10.000.000.000	4,75	10.000.000.000	9,5	10.000.000.000		
		1.03.02.2.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	1	4,75	10.000.000.000	4,75	10.000.000.000	9,5	10.000.000.000		
		1.03.02.2.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	31	60	2.000.000.000	60	2.000.000.000	120	2.000.000.000		
		1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	3	5	500.000.000	5	500.000.000	10	500.000.000		
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatnya Kualitas Layanan Air Bersih/Air Minum Permukiman Perkotaan/Pedesaan	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih/Air Minum	73,42	75	74.200.000.000	75,5	78.500.000.000	75,5	78.500.000.000	DPUPR	Kabupaten Mempawah
		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Akses Air Bersih yang tersambung kerumah penduduk	73,42	75	74.200.000.000	75,5	78.500.000.000	75,5	78.500.000.000	DPUPR	Kabupaten Mempawah
		1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	4300	1800	7.200.000.000	2000	8.000.000.000	3800	8.000.000.000		
		1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan knis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	2	1.000.000.000		
		1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	20	20	5.000.000.000	20	5.000.000.000	40	5.000.000.000		
		1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	100	100	50.000.000.000	100	50.000.000.000	200	50.000.000.000		
		1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	2	2.500.000.000	2	2.500.000.000	5	2.500.000.000		
		1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	5	5	5.000.000.000	5	5.000.000.000	10	5.000.000.000		
		1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	5312	5812	3.500.000.000	6812	7.000.000.000	6812	7.000.000.000		
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/Pedesaan	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	86,74	88	21.300.000.000	88,5	23.600.000.000	88,5	23.600.000.000	DPUPR	Kabupaten Mempawah
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Akses Layanan Sanitasi (Air limbah) Permukiman Perkotaan/Perdesaan	86,74	88	21.300.000.000	88,5	23.600.000.000	88,5	23.600.000.000	DPUPR	Kabupaten Mempawah
		1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	0	26000	4.000.000.000	26000	4.000.000.000	52000	4.000.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi		
						2025		2026		Target	Rp.			Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.						
		1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	0,08	0,16	6.000.000.000	8	6.500.000.000	8,24	6.500.000.000				
		1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	0	0,08	6.000.000.000	0,16	6.500.000.000	0,24	6.500.000.000				
		1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	0	120	1.200.000.000	250	2.500.000.000	370	2.500.000.000				
		1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	0	20	3.500.000.000	20	3.500.000.000	40	3.500.000.000				
		1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1	2	600.000.000	2	600.000.000	5	600.000.000				
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatnya Sistem Drainase yang Terintegrasi dan Efektif	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	60,38	60,7	20.800.000.000	61	20.980.000.000	61	20.980.000.000	DPUPR	Kabupaten Mempawah		
		1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Luas Wilayah Cakupan Drainase	10	20	20.800.000.000	25	20.980.000.000	35	20.980.000.000	DPUPR	Kabupaten Mempawah		
		1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	4500	500	10.000.000.000	500	10.000.000.000	2700	10.000.000.000				
		1.03.06.2.01.0022	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan	98	10	750.000.000	12	900.000.000	22	900.000.000				
		1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	5	5	50.000.000	8	80.000.000	13	80.000.000				
		1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	25000	500	10.000.000.000	500	10.000.000.000	1000	10.000.000.000				
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Sesuai dengan Fungsi dan Standar Bangunan Gedung Negara	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang Tertata dengan Baik sesuai Fungsi dan Standar Bangunan Gedung Negara	70	72	5.850.000.000	73	5.850.000.000	73	5.850.000.000	DPUPR	Kabupaten Mempawah		
		1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung Negara	70	72	5.850.000.000	73	5.850.000.000	73	5.850.000.000	DPUPR	Kabupaten Mempawah		
		1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	0	40	1.750.000.000	40	1.750.000.000	80	1.750.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi		
						2025		2026		Target	Rp.			Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.						
		1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0	20	3.500.000.000	20	3.500.000.000	40	3.500.000.000				
		1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	0	20	500.000.000	20	500.000.000	40	500.000.000				
		1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	155	75	100.000.000	75	100.000.000	150	100.000.000				
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Infrastruktur Bangunan Gedung dan Lingkungan Berkondisi Baik	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Jalan Lingkungan	50,28	53,59	31.350.000.000	56,90	31.350.000.000	56,90	31.350.000.000	DPUPR	Kabupaten Mempawah		
		1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	10	30	31.350.000.000	40	31.350.000.000	75	31.350.000.000	DPUPR	Kabupaten Mempawah		
		1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	0	30	800.000.000	30	800.000.000	60	800.000.000				
		1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	0	500	30.000.000.000	500	30.000.000.000	1000	30.000.000.000				
		1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0	30	550.000.000	30	550.000.000	60	550.000.000				
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	60,95	61,75	149.315.040.257	62,55	147.560.484.617	62,55	147.560.484.617	DPUPR	Kabupaten Mempawah		
		1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap	60,95	61,75	149.315.040.257	62,55	147.560.484.617	62,55	147.560.484.617	DPUPR	Kabupaten Mempawah		
		1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1	1	500.000.000	1	500.000.000	2	500.000.000				
		1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	2	2	525.000.000	2	800.000.000	4	800.000.000				
		1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	0,952	0,696	2.000.000.000	0,600	1.500.000.000	1,296	1.500.000.000				
		1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	9,551	28,279	130.000.000.000	22,823	130.000.000.000	51,102	130.000.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi		
						2025		2026		Target	Rp.			Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.						
		1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	-	1,468	5.525.040.257	1,432	4.730.484.617	2,900	4.730.484.617				
		1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	4	3	250.000.000	3	250.000.000	6	250.000.000				
		1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	4	3	600.000.000	3	600.000.000	6	600.000.000				
		1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	2	2	735.000.000	2	1.000.000.000	4	1.000.000.000				
		1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	632,073	632,073	300.000.000	632,073	300.000.000	632,073	300.000.000				
		1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2,574	1,492	7.000.000.000	1,044	6.000.000.000	2,536	6.000.000.000				
		1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1,600	1,400	1.380.000.000	1,200	1.380.000.000	2,600	1.380.000.000				
		1.03.10.2.01.0048	Pelebaran Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dilebarkan	-	3	500.000.000	3	500.000.000	6	500.000.000				
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatnya Layanan Informasi Jasa Konstruksi pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tersedianya Layanan Informasi Jasa Konstruksi pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi	0	10	3.200.000.000	20	3.200.000.000	30	3.200.000.000	DPUPR	Kabupaten Mempawah		
		1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi	0	10	2.000.000.000	20	2.000.000.000	35	2.000.000.000	DPUPR	Kabupaten Mempawah		
		1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	0	100	800.000.000	100	800.000.000	200	800.000.000				
		1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	0	150	300.000.000	150	300.000.000	300	300.000.000				
		1.03.11.2.01.0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihnannya	0	30	100.000.000	30	100.000.000	60	100.000.000				
		1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	0	100	800.000.000	100	800.000.000	200	800.000.000				
		1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan informasi jasa konstruksi	0	20	400.000.000	40	400.000.000	60	400.000.000	DPUPR	Kabupaten Mempawah		
		1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	0	10	300.000.000	10	300.000.000	20	300.000.000				
		1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	0	3	100.000.000	3	100.000.000	6	100.000.000				
		1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase jumlah dokumen izin usaha jasa konstruksi	0	5	200.000.000	5	200.000.000	10	200.000.000	DPUPR	Kabupaten Mempawah		
		1.03.11.2.03.0006	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi	0	5	200.000.000	5	200.000.000	10	200.000.000				
		1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase dokumen pengawasan	0	7	600.000.000	7	600.000.000	14	600.000.000	DPUPR	Kabupaten Mempawah		

Tujuan	Sasaran	Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi		
						2025		2026		Target	Rp.			Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.						
		1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	0	3	200.000.000	3	200.000.000	6	200.000.000				
		1.03.11.2.04.0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	0	4	400.000.000	4	400.000.000	8	400.000.000				
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kualitas penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Mempawah meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka pelaksanaan Sustainable Development	33	44	2.375.000.000	56	2.150.000.000	89	2.150.000.000	DPUPR	Kabupaten Mempawah		
		1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	33	56	525.000.000	56	350.000.000	89	350.000.000	DPUPR	Kabupaten Mempawah		
		1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000				
		1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1	1	90.000.000	0	0	1	0				
		1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1	1	90.000.000	1	90.000.000	2	90.000.000				
		1.03.12.2.01.0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1	1	75.000.000	1	75.000.000	2	75.000.000				
		1.03.12.2.01.0008	Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota	dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	1	1	30.000.000	1	30.000.000	2	30.000.000				
		1.03.12.2.01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	1	1	30.000.000	0	0	1	0				
		1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1	1	55.000.000	1	55.000.000	2	55.000.000				
		1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	1	1	55.000.000	0	0	1	0				
		1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	100	100	25.000.000	100	25.000.000	200	25.000.000				
		1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	33	56	900.000.000	56	850.000.000	89	850.000.000	DPUPR	Kabupaten Mempawah		
		1.03.12.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1	0	50.000.000	0	0	1	0				
		1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1	1	50.000.000	1	50.000.000	2	50.000.000				
		1.03.12.2.02.0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1	1	100.000.000	1	100.000.000	2	100.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
						2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.				
		1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	1	1	150.000.000	1	150.000.000	2	150.000.000		
		1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1	1	500.000.000	1	500.000.000	2	500.000.000		
		1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	5	5	50.000.000	5	50.000.000	10	50.000.000		
		1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	100	100	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	DPUPR	Kabupaten Mempawah
		1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1	1	320.000.000	1	320.000.000	2	320.000.000		
		1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	12	12	75.000.000	12	75.000.000	24	75.000.000		
		1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1	1	25.000.000	1	25.000.000	2	25.000.000		
		1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1	1	30.000.000	1	30.000.000	2	30.000.000		
		1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	DPUPR	Kabupaten Mempawah
		1.03.12.2.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1	1	25.000.000	1	25.000.000	2	25.000.000		
		1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	1	150.000.000	1	150.000.000	2	150.000.000		
		1.03.12.2.04.0005	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	1	1	25.000.000	1	25.000.000	2	25.000.000		
		1.03.12.2.04.0006	Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	1	1	50.000.000	1	50.000.000	2	50.000.000		
		1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	1	1	25.000.000	1	25.000.000	2	25.000.000		
		1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1	1	50.000.000	1	50.000.000	2	50.000.000		
		1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1	1	25.000.000	1	25.000.000	2	25.000.000		
		1.03.12.2.04.0010	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	1	1	25.000.000	1	25.000.000	2	25.000.000		
		1.03.12.2.04.0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1	1	25.000.000	1	25.000.000	2	25.000.000		
		1.03.12.2.04.0012	Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	1	1	25.000.000	1	25.000.000	2	25.000.000		
		1.03.12.2.04.0013	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang	1	1	25.000.000	1	25.000.000	2	25.000.000		
		1.03.12.2.04.0014	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	1	1	25.000.000	1	25.000.000	2	25.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gungjawab	Lokasi
						2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.				
		1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1	1	25.000.000	1	25.000.000	2	25.000.000		



## **BAB VII**

# **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

*Halaman 67 – 70*

## BAB VII

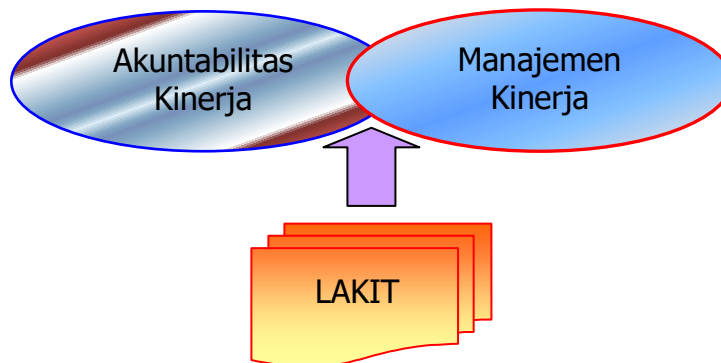
### KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT) disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT) yang kami susun memiliki dua fungsi, **Pertama**, laporan Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT) merupakan sarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah untuk menyampaikan pertanggung-jawaban kinerja kepada Bupati dan seluruh *stakeholders*. **Kedua**, Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT) merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LAKIT tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIT oleh setiap instansi pemerintah.

Gambar I.1.

#### Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIT Tahun 2023



Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mempawah mencakup hal-hal sebagai berikut :

- Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIT Tahun 2023 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2023. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama Tahun 2023.

- Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIT Tahun 2023 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap kelemahan kinerja yang ditemukan, manajemen akan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Dalam laporan kinerja tahunan ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran Tahun 2023 dan program/kegiatan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah yang dilaksanakan selama Tahun 2023.

Laporan Kinerja Tahunan ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah selama Tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) Tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Alur pikir penyusunan LAKIT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah secara skematis dapat disajikan sebagai berikut :

**Bagan Alur Pikir Penyusunan LAKIT**



## 7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel 7.1 dibawah ini :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Kabupaten Mempawah Tahun 2025 - 2026**

No.	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	61,75	62,55	63,30	63,30
2.	Persentase Bangunan Gedung yang dibangun dalam kondisi baik	70,00	72,00	73,00	73,00
3.	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman Melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi dengan Kebutuhan Pokok Minimal 60 ltr Perorang Perhari	73,42	75,00	75,50	75,50
4.	Persentase Akses Layanan Sanitasi (Air limbah) Permukiman Perkotaan/Perdesaan	86,74	88,00	88,50	88,50
5.	Persentase Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada Sesuai dengan Kewenangan	25,46	56,00	58,00	58,00
6.	Persentase Penyelenggaraan Penetapan, Perencanaan, Pemanfaatan serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang	33,00	44,00	56,00	56,00

Pada tabel 7.1 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD tahun 2025-2026 terdiri dari 6 (enam) Indikator Kinerja Utama dimana target capaian yang ingin dicapai pada setiap tahunnya selalu meningkat.

## 7.2 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel 7.2 dibawah ini:

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Kabupaten Mempawah Tahun 2025 - 2026**

No.	Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
1.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	25,46,00	56,00	58,00	58,00
2.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	73,42	75,00	75,50	75,50
3.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	86,74	88,00	88,50	88,50
4.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	61,75	62,55	63,30	63,30



## **BAB VIII**

# **PENUTUP**

*Halaman 71 – 72*

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah periode 2025 – 2026 yang secara konseptual merupakan pedoman perencanaan dan memberikan arah bagi penyelenggaraan pembangunan daerah dan acuan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah dalam menggerakkan segala sumber daya yang dimilikinya guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan Penataan Ruang Mempawah periode 2025 – 2026 juga merupakan perencanaan taktis strategis untuk menjabarkan potret permasalahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah serta indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut secara bertahap melalui sumber pembiayaan APBD.

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 dengan memperhatikan Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 dan Permenpan dan RB 53 Tahun 2014 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa RENSTRA mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, ini terkandung maksud agar lebih fleksibel dalam penjabarannya sehingga ada keluwesan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun program dan kegiatannya sesuai skala prioritas pembangunan yang ditetapkan sehingga program dan kegiatan yang direncanakan lebih realistis dan dapat diaplikasikan.

Berbagai kebijakan, program maupun kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah periode 2025 - 2026 tentunya diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah. Karena pada dasarnya apa yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah periode 2025 - 2026 merupakan cita-cita yang ingin dicapai yang bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Sementara itu untuk memudahkan pengukuran kinerja pelaksanaan Renstra/RPJMD dirumuskan indikator program sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra/RPJMD setiap tahunnya, indikator program tersebut juga merupakan indikator di tingkat sasaran dimana program tersebut ditempatkan, pengukuran kinerja dilakukan atas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun yang bersangkutan yang disesuaikan dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan kemampuan keuangan tahun bersangkutan, sehingga program- program yang termuat dalam Renstra Periode 2025 - 2026 dapat dijabarkan setiap tahunnya dalam bentuk RKPD.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Mempawah

